

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO

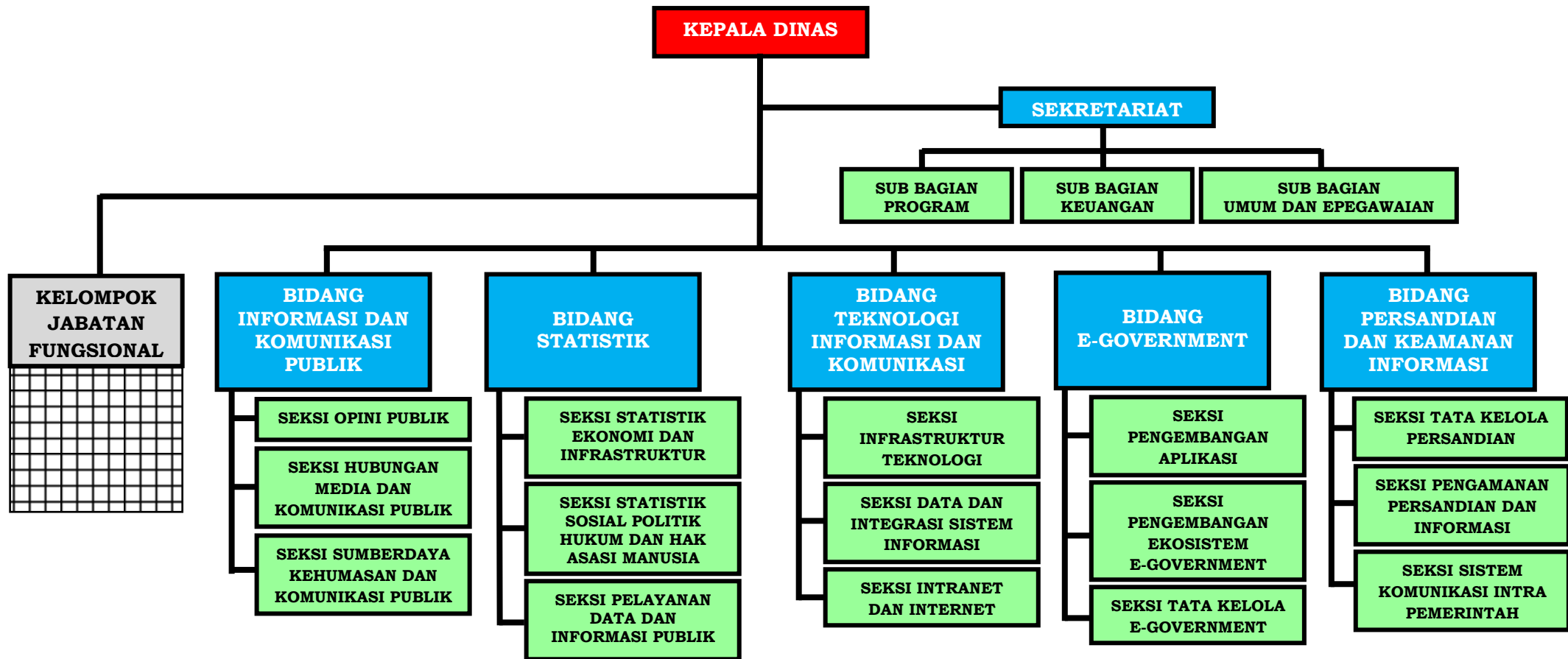
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dalam rangka pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dikeluarkan peraturan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu tugas pokok Diskominfo adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektor, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektor, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Diskominfo yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Statistik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang E-Government, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi:

- 1) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu Program, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

- 1) Subbagian Program : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program;
- 2) Subbag Keuangan : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- 3) Subbag Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Opini Publik, Hubungan Media dan Komunikasi Publik, serta Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kehumasan dan komunikasi publik;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Opini Publik, Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik, Seksi Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik, dengan tugas :

- 1) Seksi Opini Publik : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik;
- 2) Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik;
- 3) Seksi Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kehumasan dan komunikasi publik.

3. Bidang Statistik

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik

ekonomi dan infrastruktur, statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia dan pelayanan data dan informasi publik.

b. Fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan data dan informasi publik;
- 4) penyelenggaraan Kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Statistik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur; Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia; Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik serta Kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah; dengan tugas:

- 1) Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur;
- 2) Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- 3) Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan data dan informasi publik;
- 4) Disamping itu Bidang Statistik bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi, serta internet dan intranet.

b. Fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang internet dan intranet;
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi, Seksi Internet dan Intranet, dengan tugas :

- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
- 2) Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi : mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi;
- 3) Seksi Internet dan Intranet : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang internet dan intranet.

5. Bidang E-Government

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem *E-Government* dan tata kelola *E-Government*.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekosistem *E-Government*;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola *E-Government*;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang *E-Government* terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pengembangan Aplikasi, Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government*, Seksi Tata Kelola *E-Government*, dengan tugas :

- 1) Seksi Pengembangan Aplikasi : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi;
- 2) Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government* : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem *E-Government*;
- 3) Seksi Tata Kelola *E-Government* : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola *E-Government*.

6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah.

b. Fungsi:

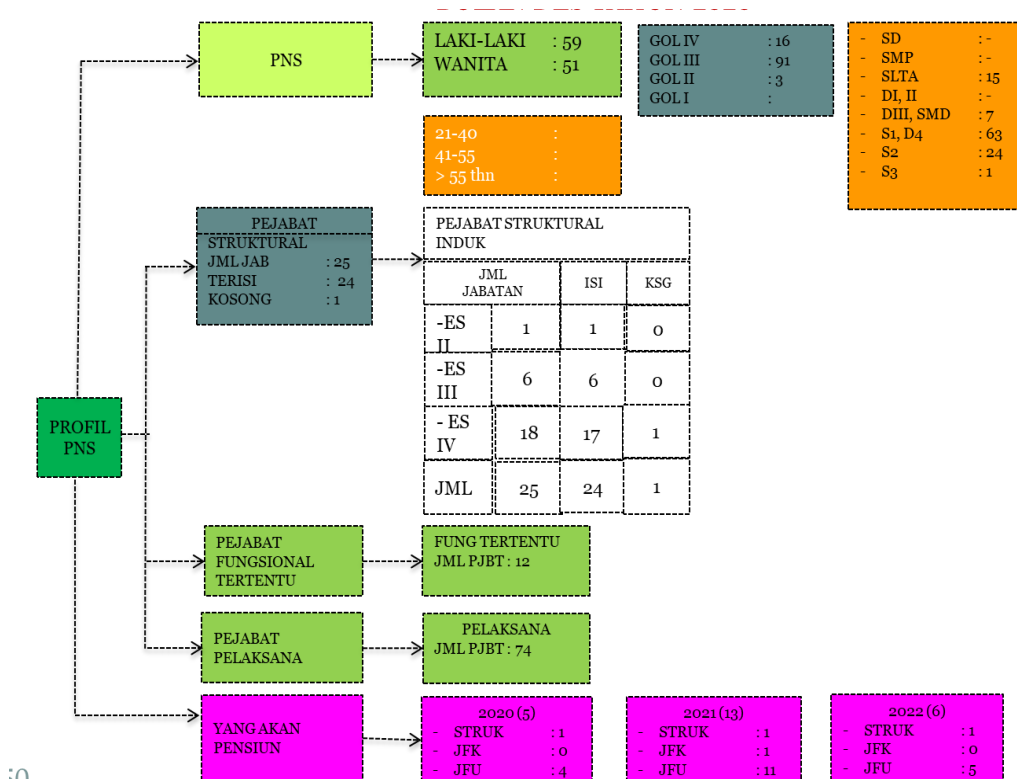
- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;

- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah;
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi terdiri atas 3 seksi yaitu Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi, Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah, dengan tugas:
- 1) Seksi Tata Kelola Persandian : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
 - 2) Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
 - 3) Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah.

2.2 Sumber Daya

2.2.1.Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sampai dengan November 2020, tercatat sebanyak 110 orang PNS dan 134 tenaga non-PNS. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:



a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan kondisi Agustus 2018 sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Jumlah dan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

JENJANG PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	JML	PROSENTASE	JML	PROSENTASE	JML	PROSENTASE
SLTA	9	60%	6	40%	15	13.64%
D-III	3	60%	2	40%	5	4.55%
D-IV	1	50%	1	50%	2	1.82%
SARMUD	2	100%	-	-	2	1.82%
S1	26	42.62%	35	57.38%	61	55.45%

S2	17	70.83%	7	29.17%	24	21.82%
S3	1	100%	-	-	1	0.90%
TOTAL	59	53.64%	51	46.36%	110	100%

Sumber: Diskominfo Prov. Jateng per Desember 2020.

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan SLTA dan S1.

b. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah kondisi Desember 2020 terbanyak adalah pegawai Golongan III (82,73%). Secara lengkap komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan.

GOLONGAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
I	-	-	-	-	-	-
II	3	100%	-	-	3	2.72%
III	45	49.45%	46	50.55%	91	82.73%
IV	11	68.75%	5	31.25%	16	14.55%
TOTAL	59	53.64%	51	46.36%	110	100%

Sumber: Diskominfo Prov. Jateng per Desember 2020.

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Diskominfo Prov. Jateng per September 2020.

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG			TOTAL	KET.
		DISKOMINFO	KPID	KIP		
1	Meja	248	86	35	369	meja kerja, pimp.dst
2	Kursi	396	138	41	575	kerja/rapat, lipat, putar
3	Meja-Kursi Tamu/Sofa	17	8	13	38	
4	Lemari / Rak	126	42	20	188	kayu, besi, kaca
5	Filling Cabinet	58	13	8	79	
6	PC Unit / CPU (printer-scanner)	135	54	21	210	
7	Kulkas	3	2	-	4	
8	AC	46	45	30	121	split dan unit
9	Exhaust Fan / kipas angin	10	6	2	18	
10	Televisi	29	52	17	98	
11	Laptop	70	12	5	87	
12	Pesawat Telepon	13	10	14	37	
13	Faxcimile / PABX	6	2	4	12	
14	Komputer Touch Screen / TV tablet	2	-	-	2	E-Gov dan Lobby lt.1
15	1 unit Sound Sistem	6	2	2	10	
16	Mesin Ketik manual	3	1	-	4	
17	Mesin Ketik Elektronik	2	5	-	7	
18	UPS / Stabilisator	20	22	-	42	
19	LAN /Internet/server/modem	9	1	-	10	
20	Mesin foto copy	1	2	-	3	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG			TOTAL	KET.
		DISKOMINFO	KPID	KIP		
21	Layar monitor slide	5	-	-	5	
22	LCD Proyektor	3	1	-	5	
23	Kendaraan roda dua	4	2	-	6	
24	Kendaraan roda empat	19	3	3	25	termasuk 1 Bus

2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo

Gambaran kinerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020 diperoleh dari Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Tahun 2019 dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 serta evaluasi s.d. triwulan III 2020 untuk gambaran kinerja Tahun 2019-2020. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
1	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik.	-	-	-	57	64	71	78	85	60	72				105,263	0,00			
2	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	-	-	-	20	40	60	70	80	20	40				100	37,50			
3	Persentase Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi.	-	-	-	45	55	65	70	85	45	55				100	100			
URUSAN STATISTIK																			
4	Persentase Ketersediaan Data Sektoral	-	-	-	74	79	89	95	100	141,11	147,39				190,69	186,57			
5	Persentase Badan Publik yang Terbuka	-	-	-	68	76	84	92	100	68	74				100,00	94,74			
URUSAN PERSANDIAN																			
6	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	-	-	-	20	37	54	71	85	16,67	20,41				83,35	55,16			
NON-URUSAN																			
7	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.	-	-	-	100	100	100	100	100	100					100				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
8	Persentase Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	-	-	-	100	100	100	100	100	100					100	0,00			

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- Rp. (000)					Realisasi Anggaran Tahun Rp. (000)			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)				(8)	(9)		(13)	(14)		(18)	(19)
1.	Urusan Komunikasi dan Informatika													
1.1	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	17.592.250	20.055.165	22.862.888	26.063.692	28.148.788	15.774.250	16.275.081		89,67	81,15		12%	2%
	Peningkatan pengelolaan informasi publik	16.166.750	18.430.950	21.010.308	23.951.751	25.867.892	13.948.750	13.827.356		86,28	75,02		12%	0%
	Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik	1.021.000	1.163.940	1.326.892	1.512.656	1.633.669	1.021.000	276.944		100,00	23,79		12%	-48%
	Analisis berita dan pendapat publik	404.500	461.130	525.688	599.285	647.227	804.500	2.170.781		198,89	470,75		12%	64%
1.2	Program pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	22.980.250	26.197.485	29.865.133	34.046.251	36.769.951	28.626.978	26.642.388		124,57	101,70		12%	-4%
	Pengelolaan Jaringan dan Data Center	15.508.500	17.679.690	20.154.847	22.976.525	24.814.647	21.199.228	19.278.181		136,69	109,04		12%	-5%
	Pengelolaan internet dan intranet	7.246.750	8.261.295	9.417.876	10.736.379	11.595.289	7.207.750	7.075.038		99,46	85,64		12%	-1%
	Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur	225.000	256.500	292.410	333.347	360.015	220.000	289.169		97,78	112,74		12%	15%
1.3	Program Pengembangan eGovernment.	4.534.714	5.169.574	5.893.315	6.718.378	7.255.848	4.534.714	9.045.012		100,00	174,97		12%	41%

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- Rp. (000)					Realisasi Anggaran Tahun Rp. (000)			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)				(8)	(9)		(13)	(14)		(18)	(19)
	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	2.303.564	2.626.063	2.993.712	3.412.831	3.685.858	2.003.564	6.928.886		86,98	263,85		12%	86%
	Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Government	459.942	524.334	597.741	681.424	735.938	459.942	489.499		100,00	93,36		12%	3%
	Peningkatan Tata Kelola E-Government	1.771.208	2.019.177	2.301.862	2.624.123	2.834.052	2.071.208	1.626.627		116,94	80,56		12%	-11%
2.	Urusan Statistik													
2.1	Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi.	3.573.550	4.073.847	4.644.185	5.294.371	5.717.921	3.444.550	1.991.277		96,39	48,88		12%	-24%
	Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan Infrastruktur	509.250	580.545	661.821	754.476	814.834	359.250	110.655		70,54	19,06		12%	-45%
	Penyusunan data statistik sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	593.500	676.590	771.313	879.296	949.640	493.500	151.426		83,15	22,38		12%	-45%
	Peningkatan pelayanan data dan informasi publik	491.500	560.310	638.753	728.179	786.433	441.500	181.243		89,83	32,35		12%	-36%
	Peningkatan keterbukaan informasi publik	1.979.300	2.256.402	2.572.298	2.932.420	3.167.014	2.150.300	1.547.953		108,64	68,60		12%	-15%
3.	Urusan Persandian													
3.1	Program Peningkatan Pemanfaatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah.	1.178.750	1.343.775	1.531.904	1.746.370	1.886.080	2.165.322	1.804.777		183,70	134,31		12%	-9%

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- Rp. (000)					Realisasi Anggaran Tahun Rp. (000)			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)				(8)	(9)		(13)	(14)		(18)	(19)
	Pengamanan persandian dan informasi	333.500	380.190	433.417	494.095	533.623	1.142.500	691.971		342,58	182,01		12%	-22%
	Tata kelola persandian	506.750	577.695	658.572	750.772	810.834	437.750	299.178		86,38	51,79		12%	-17%
	Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	338.500	385.890	439.915	501.503	541.623	585.072	813.628		172,84	210,84		12%	18%
4.	NON-URUSAN													
4.1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.	7.102.486	8.096.834	9.328.432	10.634.411	11.485.254	6.564.914	7.216.772		92,43	89,13		13%	5%
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	750.000	855.000	974.700	1.111.158	1.200.051	418.000	455.000		55,73	53,22		12%	4%
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	24.000	27.360	31.190	35.557	38.492	24.000	18.850		100,00	68,90		13%	-11%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.938.600	2.210.004	2.519.405	2.872.121	3.101.891	560.000	559.004		28,89	25,29		12%	0%
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	125.000	142.500	162.450	185.193	200.008	125.000	142.500		100,00	100,00		12%	7%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.545.100	1.761.414	2.008.012	2.289.134	2.472.264	1.758.000	1.994.610		113,78	113,24		12%	7%
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	600.000	684.000	779.760	888.926	960.041	800.000	367.195		133,33	53,68		12%	-32%
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	100.000	114.000	228.000	259.920	280.714	175.000	113.360		175,00	99,44		29%	-20%
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	20.000	22.800	25.992	29.631	32.001	20.000	12.800		100,00	56,14		12%	-20%

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- Rp. (000)					Realisasi Anggaran Tahun Rp. (000)			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)				(8)	(9)		(13)	(14)		(18)	(19)
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	813.600	927.504	1.057.355	1.205.384	1.301.815	1.238.600	1.854.837		152,24	199,98		12%	22%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	225.000	256.500	292.410	333.347	360.015	300.000	231.500		133,33	90,25		12%	-12%
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	380.686	433.982	494.740	564.003	609.123	470.686	961.341		123,64	221,52		12%	43%
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	150.000	171.000	194.940	222.232	240.010	225.000	71.826		150,00	42,00		12%	-43%
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	430.500	490.770	559.478	637.805	688.829	450.628	433.949		104,68	88,42		12%	-2%
4.2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1.038.000	1.183.320	1.348.985	1.537.843	1.660.870	750.000	419.383			35,44		12%	-25%
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	788.000	898.320	1.024.085	1.167.457	1.260.853	500.000	366.263		63,45	40,77		12%	-14%
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000	285.000	324.900	370.386	400.017	250.000	53.120		100,00	18,64		12%	-54%
	TOTAL	58.000.000	66.120.000	75.474.842	86.041.316	92.924.712	61.860.728	63.394.690		106,66	95,88	0,00	13%	1%

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2020 (data diolah), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2019 (Audited) dan Penengendalian Operasional Kegiatan (POK) Bulan Oktober 2020.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo kurun waktu 5 tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
- b. Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap Pemerintah Daerah di Jawa Tengah khususnya dalam bidang akuntabilitas dan integritas aparatur serta bidang pelayanan publik;
- c. Belum kuatnya jejaring informasi antar OPD Pemprov Jateng khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif;
- d. Pesatnya perkembangan TIK;
- e. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Jawa Tengah;
- f. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Jawa Tengah terhadap TIK dan Statistik Sektoral;
- g. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*;
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
- i. Peningkatan kapasitas SDM.

2. Peluang

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Jawa Tengah berbasis elektronik;
- b. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Kesadaran masyarakat Jawa Tengah akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;
- d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan Jawa Tengah;
- f. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.